

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian latar belakang penulis akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian ini. Pada bagian ini yang akan dibahas yaitu dari latar belakang masalah dari penelitian ini, rumusan masalah, kerangka teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian, hipotesa, tujuan dari adanya penelitian, metode dan analisa data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang

Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan perekonomian tertinggi. Sebelum adanya COVID-19 perekonomian Korea Selatan jika berdasarkan GDP pada tahun 2018 sebesar US\$ 1,599 miliar dan ditahun 2019 US\$ 1,647 miliar (IMF, 2020). Dan pada tahun 2020 ketika COVID-19 melanda negara tersebut perekonomian negara tersebut mengalami penurunan yaitu pada kuartal satu sebesar 1,3% bahkan pada kuartal dua ekonomi Korea Selatan mengalami penurunan sebesar -3,3% hal tersebut dikarenakan Korea Selatan penghasilan terbesarnya berasal dari ekspor barang dan jasa (Sebayang, 2020).

Pada Desember 2019 dunia digemparkan dengan adanya kasus *pneumoia* di salah satu kota di Wuhan, Tiongkok (Arnani, 2020). Virus *corona* atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) merupakan virus jenis baru yang menyerang manusia. COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan pada manusia seperti batuk, pilek, dan gejala kurang lebih seperti MERS dan SARS. Hingga pada 9 Agustus 2020 sebanyak 19.462.112 orang di seluruh

dunia terkena COVID-19 dan sebanyak 722.285 orang di seluruh dunia meninggal dunia (WHO, World Health Organization, 2020). Dari awal ditemukannya virus ini, kasus COVID-19 meningkat setiap harinya. Hal ini, membuat WHO memberikan pernyataan bahwa status COVID-19 adalah sebagai pandemi global.

Salah satu dampak besar yang ditimbulkan oleh COVID-19, yaitu perekonomian. Rata-rata perekonomian di berbagai negara yang terkena dampak COVID-19 mengalami krisis bahkan resesi ekonomi. Hal tersebut dikarenakan pemasukan negara yang biasanya diperoleh dari impor, ekspor, dan wisatawan terhenti karena adanya COVID-19. Banyak negara yang telah melakukan *travel banned* untuk wisatawan asing. Hal itu dilakukan untuk menghindari datangnya wisatawan dari negara yang terkena zona infeksi COVID-19 terparah.

Travel banned dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Akan tetapi, negara yang melakukan *travel banned* mengalami kerugian cukup besar. Ada pun pembatasan dalam hal melakukan pengiriman barang atau melakukan ekspor dan impor dari luar. Hal tersebut dilakukan agar mencegah dari dampak kekurangan bahan makanan atau produk penting lainnya di negara pengekspor selama negara tersebut melakukan isolasi (Chesa effendi, 2020).

Dimasa pandemi COVID-19 untuk menangani permasalahan ini akan sangat susah ditangani dengan sendiri, maka dari itu banyak negara yang butuh bantuan negara lain untuk menanganinya. Korea Selatan sangat baik dalam menangani kasus COVID-19 di negaranya terbukti dengan jumlah kematian yang rendah yaitu berdasarkan data dari WHO sebanyak 487 orang meninggal dunia dari kasus pertama yang dicatat pada 3 Januari hingga 11 November 2020 (WHO, 2020).

Dalam menangani kasus COVID-19 Korea Selatan tidak melakukan kebijakan *lockdown* secara total tetapi, mereka melakukan langkah tes secara masif, *tracking* isolasi, dan pengawasan secara ketat dinilai menjadi salah satu kunci kesuksesan dan keberhasilan pemerintah Korea Selatan dalam menangani kasus COVID-19 (Wibawa, 2020).

Sebelum adanya COVID-19, Korea Selatan merupakan salah satu negara donor atau negara pemberi bantuan ke negara lain. Bantuan yang diberikan yaitu di tahun 1977 Korea Selatan mulai memberikan bantuan luar negeri untuk ODA sebanyak 900 juta won atau setara dengan 2 juta dollar AS pada masa itu (Korea Official Development Assistance). Tidak berhenti sampai di situ saja, Korea Selatan sering memberikan bantuan lainnya melalui ODA pada tahun 2000-2014 kepada Vietnam dalam pengembangan area pedesaan model *Saemaul Undong*. Seperti yang diketahui *Saemaul Undong* merupakan program pembangunan desa yang pernah Korea Selatan yang dilakukan pada tahun 1970-1979. Hal itu bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan kehidupan penduduk desa dan memperkecil ketimpangan antara desa dan kota. Program yang dilakukan selama 10 tahun tersebut mengalami keberhasilan maka dari itu Korea Selatan menawarkan kepada negara mitra pembangunannya di bawah pendanaan ODA. Hasil yang di dapat yaitu beberapa program *Saemaul Undong* yang diterapkan ke Vietnam mengalami beberapa keberhasilan dan beberapa di antaranya masih dalam proyek (Lestari, 2016).

Bantuan lainnya yang diberikan oleh Korea Selatan melalui ODA yaitu bantuan bencana alam berupa rekonstruksi pada tahun 2006 untuk Indonesia. Pada

tahun 2004 Indonesia mengalami bencana alam Tsunami Aceh yang menewaskan sebanyak 227,000 korban jiwa serta meluluh lantahkan berbagai fasilitas dan tempat tinggal yang ada. Banyak negara yang memberikan bantuan kepada Indonesia pada saat itu salah satunya yaitu Korea Selatan. Korea Selatan memberikan bantuan rekonstruksi untuk Indonesia pada 2006-2010 diperkirakan yaitu sebesar 441,2 juta dolla AS. Dalam bentuk dana sebanyak 309,9 juta dollar AS dana konsesi dan 104,3 juta dollar AS dalam bentuk komitmen anggaran. Rekonstruksi yang dibuat oleh Korea Selatan yaitu berupa fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit (Muzwardi, 2016).

Di saat pandemi COVID-19 Korea Selatan juga memberikan bantuan kepada negara prioritas atau negara mitra Korea Selatan. Perdana Menteri Korea Selatan, mengatakan Chung Sye-Kyun berniat untuk bekerja sama dalam bantuan internasional untuk menangani pandemi global yang sekarang sedang terjadi. Bantuan tersebut termasuk peningkatan bantuan pembangunan resmi (Official Development Assistance, ODA) yang nantinya bantuan-bantuan tersebut akan di berikan kepada negara-negara berkembang (World, 2020). Sebelumnya Perdana Menteri Korea Selatan mengatakan hal tersebut Korea Selata telah memberikan bantuan atau menjadi salah satu negara donor dalam pandemi COVID-19. Sebanyak 120 negara di dunia yang menginginkan bantuan berupa bantuan alat test kesehatan yang sangat akurat dari Korea Selatan. Bukan hanya test COVID-19 saja tetapi juga alat kesehatan yang lainnya yang sangat dibutuhkan selama COVID-19 masih ada. Tetapi Korea Selatan hanya memberikan prioritas kepada tiga negara saja yaitu kepada Amerika Serikat, Uni Emirat Arab (UEA), dan juga Indonesia

(Iswara, 2020). Korea Selatan memberikan prioritas kepada ketiga mitranya yaitu dikarenakan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 terhadap ketiga negara tersebut.

Amerika Serikat sendiri menerima alat test COVID-19 dari Korea Selatan sebanyak 750.000 alat test (Government, 2021). Uni Emirat Arab menerima bantuan alat test COVID-19 sebanyak 51.000 alat test (KITA, 코로나 진단 키트 UAE에 5만1000개 첫 수출...17개국 요청, 2020). Dan Indonesia menerima bantuan dari Korea Selatan sebesar US\$ 1 miliar. Bantuan tersebut berupa 300 buah alat sterilisasi semprot, 32.200 alat test COVID-19, dan juga masker KF-94 sebanyak 5.000 eksemplar atau sekitar 620.000 (성혜미, 2020).

Korea Selatan memberikan prioritas bantuan kepada ketiga mitranya tersebut dikarenakan bukan hanya dikarenakan ketiga negara tersebut sedang mengalami lonjakan kasus saja akan tetapi pada setiap mitranya terdapat alasan masing-masing dan rata-rata negara-negara tersebut memiliki hubungan bilateral yang baik dan saling menguntungkan satu sama lain. Maka dari itulah mengapa Korea Selatan memberikan prioritas kepada ketiga negara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menarik sebuah rumusan masalah yaitu **“Mengapa Korea Selatan menjadikan Indonesia sebagai salah satu prioritasnya dalam bantuan COVID-19?”**

C. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah yang sudah penulis buat, maka penulis akan menjawab rumusan masalah tersebut dengan menggunakan teori diplomasi ekonomi.

1. Teori Diplomasi Ekonomi

Untuk mendefinisikan diplomasi ekonomi perlu mengetahui terlebih dahulu jika diplomasi ekonomi memerlukan lembaga lain selain negara guna mencapai tujuan dan kepentingan suatu negara. Mengutip dari buku berjudul *The New Economic Diplomacy: Decision-making and negotiation in international economic relations* ditulis oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock diplomasi ekonomi berbeda dengan diplomasi pada umumnya yaitu dikarenakan diplomasi ekonomi dapat dilakukan oleh aktor lain selain negara. Cakupan dan isi dari diplomasi ekonomi jauh lebih luas dan lebih terarah. Akan tetapi walaupun demikian pada penelitian ini hanya akan memfokus diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh negara saja. Pengertian diplomasi ekonomi menurut Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock terbagi menjadi empat bagian, yaitu diplomasi ekonomi *international and domestic, state and non-state actors, instruments and issues*, dan *the impact of markets* (Woolcock, 2017).

Bagian pertama *international and domestic*. Jika ditelaah dari sistem Bretton Woods mengembangkan aturan untuk hubungan ekonomi antar negara, tetapi urusan kenegaraan tidak tersentuh sama sekali. Selama kebijakan yang berada di dalam negara tidak berdampak negatif terhadap hal-hal yang berada di negara tersebut pemerintah dapat mengejar kebijakan yang pemerintah sendiri akan buat.

Kemajuan globalisasi yang sudah ada sejak 1990 mengharuskan diplomasi ekonomi untuk mendalami pengambilan keputusan domestik atau di dalam negeri agar dapat menagkap dampak dari internasional. Dengan demikian diplomasi ekonomi dapat menjadi lebih kompleks, dengan membawa lebih banyak isu dan lebih banyak aktor (Woolcock, 2017).

Pengertian yang kedua *state and non-state actors*, diplomasi ekonomi dalam unsur negara berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Semua lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab ekonomi dan beroperasi secara internasional terlibat dalam diplomasi ekonomi, meskipun pemerintah tidak menjelaskannya. Menteri dan kepala pemerintahan, parlemen, badan publik independen dan badan subnasional semuanya memiliki pengaruhnya masing-masing. Sedangkan *non-state actors* juga terlibat dalam diplomasi ekonomi, baik dengan membentuk kebijakan pemerintah maupun sebagai pemain independen dalam dirinya sendiri. Jika di masa lalu, perusahaan bisnis merupakan kelompok kepentingan yang paling aktif. Perusahaan menggunakan pengaruhnya terutama di balik layar, walaupun demikian sekarang sektor keuangan menjadi perhatian (Woolcock, 2017). Tetapi dalam penelitian ini penulis hanya akan berfokus kepada *state* atau negara sebagai aktor yang melakukan diplomasi ekonomi.

Instruments and issues, walaupun mencakup semua berbagai instrumen seperti spektrum tindakan mulai dari negosiasi informal dan kerja sama sukarela, melalui jenis regulasi lunak (kode etik), hingga pembuatan dan penegakan aturan yang mengikat. Diplomasi ekonomi paling baik di definisikan bukan oleh instrumennya, tetapi oleh masalah ekonomi yang menyediakan isinya. Menurut

buku yang di tulis oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock untuk menentukan ruang lingkup negosiasi menurut Odell: 'kebijakan yang berkaitan dengan produksi, pergerakan atau pertukaran barang, jasa, investasi (termasuk bantuan pembangunan resmi), uang, informasi dan regulasi mereka' (Odell, 2000, hal. 11). Adapun definisi lain untuk menggambarkan definisi ekonomi dari *instruments and issues* yaitu konsep negara ekonomi, di mana langkah-langkah ekonomi di ambil dalam mengejar tujuan politik, termasuk tindakan hukuman seperti sanksi (Baldwin 1985, Hanson 1988 dan Blanchard dan Ripsman 2008).

The impact of market, ciri khas diplomasi ekonomi adalah peka terhadap perkembangan pasar. Hal ini yang membedakan diplomasi ekonomi dari diplomasi politik dan kajiannya melalui analisis kebijakan luar negeri. Integrasi ekonomi yang meningkat telah menciptakan pasar global untuk produksi dan investasi. Kebijakan regulasi nasional dapat mengubah daya saing di berbagai lokasi, sehingga pasar dapat menghukum kebijakan nasional yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Perkembangan pasar akan membentuk pelaku yang terlibat dalam masalah apapun, mempengaruhi posisi negosiasi mereka dan kemungkinan menawarkan alternatif solusi yang dinegosiasikan. Seperti yang dikatakan Odell, pasar dapat menjadi endogen bagi diplomasi ekonomi, dalam hal itu mereka merupakan bagian integral dari proses (Odell, 2000, hal. 47-69). Namun, klaim bahwa pasar selalu menawarkan solusi yang lebih efisien telah dirusak oleh runtuhnya sistem keuangan di negara-negara industri seperti Amerika Serikat, di mana keangkuhan para bankir dan pengabaian regulator menyebabkan bencana. Pemerintah dan regulator kini sedang mencari proses yang akan mendisiplinkan lembaga keuangan, tanpa

membekukannya, dan mencegahnya menjadi beban negara (Woolcock, 2017, hal. 49-55).

Dari penjelasan mengenai diplomasi ekonomi di atas dapat disimpulkan jika diplomasi ekonomi sebagai proses suatu negara dapat menyelesaikan masalahnya dengan negara lain agar dapat memaksimalkan pendapatan dan perolehan negara melalui kegiatan ekonomi dan pertukaran ekonomi secara bilateral maupun multilateral. Dalam pengaplikasiannya di dalam teori ini dan juga kepentingan nasional sebagai contoh, yaitu Korea Selatan dan Indonesia yang saat ini Indonesia adalah salah satu negara yang kurang siap dalam menangani COVID-19. Dikarenakan Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hubungan bilateral yang sangat baik maka dari itu Korea Selatan memberikan bantuan kepada Indonesia. Dengan Korea Selatan membantu Indonesia Korea Selatan juga memiliki hal lainnya yang harus mereka penuhi. Melalui *New Southern Policy* dan *Special Strategic Partnership* Korea Selatan melakukan diplomasi ekonomi. Yang dimana di dalam *New Southern Policy* dan *Special Strategic Partnership* merupakan kerja sama multilateral dan bilateral yang berfokus kepada ekonomi dan pembangunan. Maka dengan demikian Korea Selatan memberikan bantuan COVID-19 kepada Indonesia dengan bantuan tersebut Korea Selatan memberikan bantuan tersebut sebagai alat untuk melakukan diplomasi ekonominya.

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang, penggunaan teori, dan konsep tersebut, maka penulis menyimpulkan hipotesa yaitu:

1. Korea Selatan menjadikan Indonesia sebagai salah satu prioritasnya dalam bantuan COVID-19 karena adanya *Special Strategic Partnership* dan mewujudkan *New Southern Policy*.
2. Korea Selatan tidak ingin Indonesia mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 dikarenakan Korea Selatan ingin mempertahankan pasarnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan:

1. Untuk membuktikan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan konsep dan teori yang digunakan.
2. Untuk mencari tau dibalik alasan Korea Selatan memberikan bantuan COVID-19 kepada Indonesia dengan cara menelaah dari kerja sama-kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara.

F. Metode Pengumpulan dan Analisa Data

Dalam tulisan ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami (Taylor, 1975). Saryono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif menyatakan, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menganalisis, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010). Sedangkan dalam pengumpulan data penulis akan

menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah terhadap buku, literatur, catatan, jurnal, dan berbagai sumber lainnya yang relevan.

G. Jangkauan Penelitian

Batasan dari skripsi ini yaitu mengenai bantuan luar negeri antara Korea Selatan kepada Indonesia pada saat COVID-19 serta alasan Korea Selatan memberikan prioritas bantuan atau donor bantuan kepada Indonesia. Dikarenakan Korea Selatan memiliki kepentingan nasional baru yaitu berupa *New Southern Policy* dan mengapa Korea Selatan menjadikan Indonesia partner dalam mengembangkan kebijakan terkait *New Southern Policy*. Jika berdasarkan tahun batasan dari penelitian ini yaitu dari tahun 2017-2020.

H. Sistem Penulisan

BAB I: Penulis akan membahas mengenai latar belakang, rumusana masalah, teori dan konsep, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan dan analisa data, jangkauan penelitian, dan juga sistem penulisan.

BAB II: Penulis akan membahas mengenai alasan Korea Selatan memberikan bantuan kepada Indonesia. Pada BAB II penulis akan membahas mengenai politik luar negeri Korea Selatan, hubungan bilateral kedua negara, dan keberhasilan Korea Selatan dalam menangani COVID-19.

BAB III: Bagian terakhir di BAB skripsi penulisan akan memberikan kesimpulan yang sudah dituliskan dari BAB I hingga BAB II.